

Laporan: Ardi,
Baubau
Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus memperkuat sektor budaya dan pariwisata melalui penyelenggaraan Wonderful Siompu Island 2026 yang resmi dibuka Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. di Lapangan Lawakamo, Kecamatan Siompu Barat, Sabtu (13/6/2026). Festival yang berlangsung hingga 15 Juni itu diharapkan menjadi penggerak ekonomi kreatif sekaligus sarana pelestarian warisan budaya lokal.

Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa Pulau Siompu memiliki potensi besar pada sektor budaya, wisata, dan produk unggulan daerah yang layak diperkenalkan lebih luas. "Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya melestarikan budaya dan tradisi leluhur, tetapi juga memperkenalkan potensi wisata, ekonomi kreatif, serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas," ujar Bupati saat membuka acara.

Festival bertema "Warisan yang Menari, Budaya yang Ditenun" itu merupakan inisiatif Komunitas Siompu Ethnic Journey bersama pemuda Siompu dan Siompu Barat. Kegiatan ini lahir dari kepedulian terhadap semakin kuatnya arus globalisasi yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal. Secara historis, Indonesia telah lama menjadikan festival budaya sebagai

Lanjut ke Hal: 7

Kepala BKAD Hasmin Joko Ungkap Penyebab Serapan APBD Buton Selatan Masih 32,80 Persen Hingga Pekan Kedua Juni 2026, Optimis Pembangunan Kantor Bupati Bisa Dongkrak Diatas 50 Persen Pada Bulan Juli



Kepala BKAD Bussel
Hasmin Joko

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Realisasi serapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan hingga pertengahan Juni 2026 masih berada di angka 32,80 persen. Meski belum mencapai target ideal menjelang berakhirnya semester pertama, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan optimistis realisasi belanja daerah akan meningkat signifikan dalam beberapa pekan ke depan.

Kepala Badan

Lanjut ke Hal: 7

Laporan: Firman
BUTON SELATAN, BP- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko meninjau lokasi pembangunan Batalyon

Bupati H Muh Adios Sambut Pangdam XIV Hasanuddin Untuk Tinjau Yonif TP 871 Lamaindo Disiapkan Perkuat Keamanan dan Dongkrak Stabilitas Buton Selatan



Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 871 Lamaindo di Kabupaten Buton Selatan, Kamis (12/6/2026). Kunjungan kerja tersebut disambut langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, sebagai bagian

dari penguatan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung pertahanan serta pembangunan wilayah kepulauan.

Peninjauan yang berlangsung di Lapangan

Lanjut ke Hal: 7

BUPATI BUTON SELATAN H MUH ADIOS Buka WONDERFUL SIOMPU ISLAND 2026

DIWARNAI SERIBU PENARI LINDA SEKALIGUS PERKUAT BUDAYA DAN WISATA BUTSEL

Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A. secara resmi membuka Pagelaran Budaya Akbar Wonderful Siompu Island 2026 di Lapangan Lawakamo, Kecamatan Siompu Barat, Sabtu (13/6/2026).



"Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya melestarikan budaya dan tradisi leluhur, tetapi juga memperkenalkan potensi wisata, ekonomi kreatif, serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas."

- H. MUHAMMAD ADIOS, S.SOS., M.B.A.
BUPATI BUTON SELATAN

WAKTU PELAKSANAAN
13 - 15 JUNI 2026

TEMPAT
LAPANGAN LAWAKAMO, KECAMATAN SIOMPU BARAT

TEMA
"WARISAN YANG MENARI, BUDAYA YANG DITENUN"

ATRAKSI UTAMA
KOLOSAL 1.000 PENARI LINDA

RANGKAIAN KEGIATAN
• TALKSHOW DIGITALISASI PEMASARAN & UMKM BERSAMA BANK INDONESIA
• AKSI BERSIH PANTAI MASSAL (SIOMPU CLEAN-UP)
• FASHION SHOW & WORKSHOP KAIN TENUN TRADISIONAL SIOMPU
• LOMBA KULINER OLAHAN TRADISIONAL SIOMPU
• LAUNCHING GERAKAN PROMOSI JERUK SIOMPU

TUJUAN
MELESTARIKAN BUDAYA, MEMPERKUAT SILATURAHMI, Mendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Buton Selatan

Wonderful
SIOMPU ISLAND 2026
Warisan yang Menari,
Budaya yang Ditenun

O P I N I

Transformasi Layanan Informasi Bawaslu: Dari Keterbukaan Menuju Kepercayaan Publik



Oleh: Sarmin, S.Pd.
Ketua Bawaslu Kota Baubau

Di era digital saat ini, hubungan antara lembaga publik dan masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi informasi telah membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi, sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.

Keberhasilan sebuah institusi publik kini tidak hanya diukur dari seberapa baik lembaga

tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan publik. Masyarakat menginginkan informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks itulah keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lanjut ke Hal: 7

Apel Siaga dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di BPS Buton Selatan, Petugas SE 2026 Mulai Turun ke Lapangan



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan menggelar kegiatan Apel Siaga dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai bentuk kesiapan sekaligus tanda dimulainya pelaksanaan pendataan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (15/6) di halaman Kantor BPS Kabupaten Buton Selatan dan berlangsung dengan khidmat serta penuh semangat.

Apel siaga diikuti oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, khususnya perwakilan dari wilayah Kecamatan Batauga yang dipilih karena kedekatannya dengan kantor BPS Kabupaten Buton Selatan. Kehadiran para petugas ini mencerminkan

kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan ekonomi di wilayah tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton Selatan serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Selatan. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan adanya sinergi dan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Dalam arahnya,

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Buka Wonderful Siompu Island 2026, Diwarnai Seribu Penari Linda Sekaligus Perkuat Budaya dan Wisata Butsel

instrumen pelestarian tradisi, sejalan dengan pengakuan berbagai warisan budaya dunia oleh UNESCO yang menempatkan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pembukaan festival berlangsung meriah dan disaksikan ribuan masyarakat. Kedatangan Bupati disambut dengan pengalungan bunga serta tarian Manca sebagai bentuk penghormatan adat. Hadir pula Ketua TP-PKK Kabupaten Buton Selatan Ny. Hj. Siti Norma Adios, Sekretaris Daerah La Ode Harwanto, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, pemerintah provinsi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga tokoh pemuda.

Beragam agenda me-

warnai pelaksanaan festival, mulai dari kolosal 1.000 Penari Linda, talkshow digitalisasi pemasaran dan penguatan UMKM bersama Bank Indonesia, aksi bersih pantai Siompu Clean-Up, fashion show dan workshop tenun tradisional, lomba kuliner khas daerah, hingga peluncuran Gerakan Promosi Jeruk Siompu. “Semangat gotong royong dan kreativitas masyarakat menjadi kekuatan besar dalam membangun daerah,” kata Muhammad Adios.

Secara historis, pengembangan festival budaya terbukti mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah. Di tingkat nasional, sejumlah festival budaya seperti Festival Danau Toba dan Jember

Fashion Carnaval berhasil mengangkat citra daerah ke tingkat internasional. Sementara secara global, negara-negara seperti Jepang melalui Gion Matsuri dan Brasil melalui Rio Carnival menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi penggerak ekonomi berbasis pariwisata.

Wonderful Siompu Island 2026 juga menjadi ruang mempererat hubungan sosial masyarakat yang dinilai mulai tergerus modernisasi. “Kegiatan ini adalah bukti bahwa kecin-taan terhadap budaya daerah masih tumbuh kuat di tengah perubahan zaman,” ujar Bupati. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pun berkomitmen mendukung kegiatan serupa sebagai bagian dari penguatan identitas daerah.

Bupati berharap Wonderful Siompu Island dapat berkembang menjadi agenda tahunan berskala nasional bahkan internasional. “Kami berharap festival ini semakin besar, menarik wisatawan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya. Harapan tersebut sejalan dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis budaya yang kini menjadi tren di berbagai negara.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bupati Muhammad Adios secara resmi membuka Wonderful Siompu Island 2026. Festival ini tidak hanya menjadi panggung seni dan tradisi, tetapi juga simbol upaya menjaga jati diri budaya di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. (*)

Kepala BKAD Hasmin Joko Ungkap Penyebab Serapan APBD Buton Selatan Masih 32,80 Persen Hingga Pekan Kedua Juni 2026, Optimis Pembangunan Kantor Bupati Bisa Dongkrak Diatas 50 Persen Pada Bulan Juli

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buton Selatan, Hasmin Joko, mengatakan rendahnya serapan anggaran saat ini bukan disebabkan minimnya aktivitas belanja daerah, melainkan karena sebagian besar dana transfer dari pemerintah pusat belum tersalurkan.

“Kalau posisi per 12 Juni 2026 sudah mencapai 32,80 persen. Sebelumnya pada akhir Mei masih berada di angka 31,22 persen. Idealnya memang menjelang akhir semester pertama sudah mendekati 50 persen, namun kondisi ini dipengaruhi oleh belum turunnya sejumlah dana transfer dari pusat,” ujar Hasmin saat diwawancara diruang kerjanya Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hingga saat ini dana transfer yang rutin masuk ke daerah baru Dana Alokasi Umum Block Grant (DAU BG) yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan masih menunggu proses penyaluran.

Hasmin menjelaskan, pemerintah pusat baru saja melakukan pembauran sistem pada aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk mengakomodasi mekanisme penyaluran DAU SG. Saat ini BKAD bersama OPD terkait sedang melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan pencairan.

“DAU SG ini ada dua sektor, yakni pendidikan dan kesehatan. Kami sementara menyelesaikan seluruh syarat salur. Kalau semua dokumen sudah lengkap dan diverifikasi, dana tersebut akan langsung direalisasikan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Selain DAU SG, Dana Bagi Hasil (DBH) juga belum sepenuhnya diterima daerah. Hingga kini baru sebagian kecil DBH sektor sumber daya alam yang telah disalurkan, sedangkan DBH pajak dan komponen lainnya masih menunggu proses transfer dari pemerintah pusat.

Hasmin mengakui ketergantungan Kabupaten Buton Selatan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Dari total struktur pendapatan daerah, sekitar 37 persen masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.

“Kondisi ini hampir dialami seluruh daerah. Dana sebenarnya tersedia, hanya mekanisme penyalurannya sekarang mengalami

perubahan sehingga membutuhkan tahapan administrasi yang lebih detail,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah OPD pengampu Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan. Beberapa sektor yang memberikan kontribusi antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Namun demikian, sebagian pendapatan tersebut belum seluruhnya tercatat dalam sistem elektronik karena masih dalam proses penginputan data oleh masing-masing OPD.

“Secara manual sudah ada penerimaan. Tetapi karena menggunakan sistem terintegrasi, seluruh transaksi harus diinput terlebih dahulu agar dapat terbaca sebagai realisasi resmi,” ujarnya.

Untuk sektor perizinan, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah menunjukkan progres cukup baik. Dari target Rp60 juta tahun ini, realisasi sementara telah mencapai sekitar Rp15 juta.

dan Filipina juga memperkuat satuan militer di wilayah strategis guna menjamin keamanan maritim dan mendukung pembangunan kawasan terpencil. Langkah serupa menunjukkan bahwa penguatan pertahanan wilayah kepulauan merupakan tren global dalam menghadapi tantangan geopolitik modern.

Selain meninjau lokasi pembangunan, Pangdam XIV/Hasanuddin juga bertatap muka dengan prajurit yang bertugas di wilayah kepulauan. “Prajurit harus tetap menjaga semangat pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara,” ujar Mayjen TNI Bangun Nawoko memberi motivasi kepada personel.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris

Sementara itu, proyek pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang menjadi salah satu kegiatan fisik terbesar tahun ini juga terus berjalan sesuai jadwal. Peletakan batu pertama direncanakan dilakukan pada pekan keempat Bulan Juni 2026.

Menurut Hasmin, proyek tersebut akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan serapan anggaran daerah karena nilai kegiatannya cukup signifikan.

“Kalau pembangunan Kantor Bupati sudah mulai berjalan dan DAU SG sudah turun, maka serapan anggaran akan meningkat cukup tajam. Karena itu kami masih sangat optimis pada Juli nanti realisasi APBD bisa mencapai bahkan melampaui 50 persen,” katanya.

Ia juga mengimbau seluruh OPD agar terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga target serapan anggaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

“Intinya optimalkan belanja dan percepat realisasi pendapatan. Kalau seluruh OPD bergerak maksimal, serapan anggaran akan meningkat dengan sendirinya,” pungkasnya. (*)

Daerah Kabupaten Buton Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Kehadiran para pemangku kepentingan mencerminkan dukungan luas terhadap pembangunan Yonif TP 871 Lamaindo.

Keberadaan Yonif TP 871 Lamaindo diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga mendorong stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan percepatan pembangunan di Buton Selatan. “Sinergi TNI dan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” kata H. Muhammad Adios. (*)

Transformasi Layanan Informasi Bawaslu: Dari Keterbukaan Menuju Kepercayaan Publik

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan, Bawaslu juga dituntut untuk membuka ruang bagi masyarakat agar dapat mengetahui, memahami, dan ikut mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan.

Keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi karena amanat undang-undang. Lebih dari itu, keterbukaan telah menjadi instrumen strategis dalam membangun hubungan yang sehat antara lembaga negara dan masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan teori Open Government yang menempatkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama pemerintahan modern. Pemerintahan yang terbuka tidak hanya menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang bagi publik untuk terlibat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks Bawaslu, keterbukaan tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai informasi publik, mulai dari hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, produk hukum, laporan kinerja, hingga penggunaan anggaran. Seluruh informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui mekanisme pelayanan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kehadiran PPID menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu dalam menjalankan prinsip transparansi. Melalui layanan informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana lembaga menjalankan tugas dan kewenangannya.

Keterbukaan informasi juga memiliki fungsi penting dalam mengurangi kesenjangan informasi antara lembaga dan masyarakat. Tidak sedikit ketidakpercayaan publik terhadap suatu institusi muncul bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan lembaga tersebut, melainkan karena minimnya informasi yang diterima masyarakat.

Ketika informasi sulit diperoleh, ruang publik sering kali dipenuhi

spekulasi, rumor, bahkan disinformasi. Akibatnya, persepsi negatif mudah terbentuk. Sebaliknya, ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat memiliki dasar yang lebih objektif untuk menilai kinerja suatu lembaga.

Selain meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi juga mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Informasi yang memadai memungkinkan masyarakat memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Pemahaman tersebut kemudian mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi berkembang menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi. Semakin luas partisipasi masyarakat, semakin kuat pula pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Partisipasi yang lahir dari keterbukaan informasi pada akhirnya menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Ketika publik memiliki akses terhadap informasi yang relevan, mereka dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik.

Kondisi ini mendorong setiap institusi untuk bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Transparansi pun tidak berhenti pada keterbukaan semata, tetapi berkembang menjadi budaya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan antara keterbukaan informasi dan kepercayaan publik dijelaskan oleh ilmuwan politik Russell Hardin melalui teori Public Trust. Menurut Hardin, kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi tidak muncul secara otomatis hanya karena lembaga tersebut memiliki kewenangan hukum. Kepercayaan lahir dari keyakinan publik bahwa institusi tersebut bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, keterbukaan informasi menjadi sarana yang memungkinkan masyarakat menilai integritas dan profesionalisme sebuah lembaga. Ketika Bawaslu secara konsisten membuka akses informasi, memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, serta

menjelaskan setiap kebijakan secara transparan, masyarakat memperoleh bukti nyata bahwa lembaga tersebut bekerja secara profesional dan dapat dipercaya.

Kepercayaan publik sesungguhnya merupakan hasil dari akumulasi tindakan yang menunjukkan bahwa sebuah institusi layak dipercaya. Dalam konteks Bawaslu, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengawasi pemilu, tetapi juga melalui kemampuan menjelaskan proses pengawasan tersebut kepada masyarakat secara terbuka.

Di sinilah peran PPID menjadi sangat strategis. PPID tidak lagi sekadar dipahami sebagai unit pelayanan administrasi informasi, tetapi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Setiap informasi yang dipublikasikan, setiap permohonan informasi yang dilayani, dan setiap komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya memperkuat citra kelembagaan yang terbuka dan akuntabel.

Tantangan di era media sosial saat ini bukan lagi sekadar menyediakan informasi, tetapi memastikan bahwa informasi yang disampaikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, akurat, dan kredibel. Karena itu, transformasi layanan informasi publik menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir. Keterbukaan merupakan pintu masuk menuju pemahaman publik. Pemahaman melahirkan partisipasi. Partisipasi menciptakan akuntabilitas. Akuntabilitas membangun kepercayaan. Kepercayaan memperkuat legitimasi lembaga. Dan legitimasi yang kuat menjadi fondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan terpercaya.

Melalui penguatan layanan informasi publik dan optimalisasi peran PPID, Bawaslu tidak hanya menjalankan amanat keterbukaan informasi, tetapi juga sedang membangun jembatan kepercayaan antara lembaga pengawas pemilu dan masyarakat. Sebab demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik berjalan beriringan. (*)

gan Lakarada, Batauga, itu dilakukan untuk memastikan tahapan pembangunan Yonif TP 871 Lamaindo berjalan sesuai target. Kehadiran satuan baru tersebut diproyeksikan menjadi kekuatan strategis TNI Angkatan Darat dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mempercepat pembangunan kawasan di Buton Selatan.

Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan satuan baru tersebut. “Pemerintah Kabupaten Buton Selatan siap mendukung penuh pembangunan Yonif TP 871 Lamaindo sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dan TNI,” ujarnya.

Menurut Pangdam XIV/Hasanuddin, pembangunan satuan teritorial

memiliki arti penting bagi wilayah kepulauan yang membutuhkan penguatan aspek pertahanan sekaligus pemberdayaan masyarakat. “Kehadiran satuan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan daerah,” kata Pangdam dalam kesempatan tersebut.

Secara historis, konsep satuan teritorial telah lama menjadi bagian dari strategi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Sistem pertahanan semesta yang melibatkan kekuatan militer dan masyarakat terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kedaulatan negara, termasuk pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah 1945.

Dalam konteks internasional, sejumlah negara kepulauan seperti Jepang

Apel Siaga dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di BPS Buton Selatan, Petugas SE 2026 Mulai Turun ke Lapangan

Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan, Bapak La Ode Ikhsanuddin Hamid, SST., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen seluruh petugas sebelum terjun ke lapangan. Ia berharap para petugas dapat menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mengumpulkan data secara jujur, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Selain itu, petugas juga diingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas di lapangan.

Sebagai bagian dari

rangkaian kegiatan, dilaksanakan pembacaan ikrar Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dipimpin oleh perwakilan petugas dari Kecamatan Batauga dan diikuti secara serentak oleh seluruh peserta apel. Ikrar tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga kualitas pelaksanaan sensus dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pusat Statistik.

Kegiatan apel siaga juga dirangkaikan dengan doa bersama yang dipimpin untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan keberhasilan seluruh rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Suasana khidmat terasa saat seluruh peserta apel mengikuti doa dengan penuh harap agar tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik.

Acara ditutup dengan prosesi pelepasan petugas secara simbolis oleh Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan sebagai tanda dimulainya kegiatan pendataan di lapangan. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan dapat berjalan lancar, sukses, dan menghasilkan data yang akurat guna mendukung pembangunan daerah. (*)

Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Pemerintah Terbuka



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah, sementara Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog dan menerima kritik publik.

Pertemuan yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden itu berlangsung beberapa hari setelah aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aspirasi yang disampaikan mencakup penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi

program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar pemerintah mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan kebijakan.

Dalam dialog tersebut, Gibran mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kritik dan evaluasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujar Gibran saat menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden.

Wapres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan publik. “Saya sadar bahwa masih banyak minus-minusnya, kekurangannya ban-

yak, dan ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran. Ia pun menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan mahasiswa.

Salah seorang perwakilan mahasiswa mengungkapkan apresiasinya terhadap sikap terbuka Wapres. Menurutnya, seluruh tuntutan dicatat dan dijanjikan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka,” ujar mahasiswa tersebut.

Secara historis, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik telah menjadi bagian penting perjalanan demokrasi Indonesia. Gerakan mahasiswa 1966 berperan dalam transisi politik Orde Lama, sementara aksi Reformasi 1998 menjadi tonggak perubahan politik nasional yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Tradisi kritik mahasiswa juga terus

hadir dalam berbagai isu kebangsaan hingga saat ini.

Di tingkat internasional, gerakan mahasiswa memiliki catatan panjang dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Demonstrasi mahasiswa di Paris pada 1968, gerakan pro-demokrasi di Korea Selatan pada 1980-an, hingga aksi mahasiswa Hong Kong beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kampus kerap menjadi ruang lahirnya kritik dan partisipasi warga negara dalam demokrasi.

Pertemuan antara Wapres dan mahasiswa ini mencerminkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, ruang komunikasi yang terbuka dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aspirasi masyarakat. (*)

Qodari Tegaskan Dialog Jadi Pilar Utama Demokrasi Indonesia

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa dialog merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden pembubaran diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam.

Menurut Qodari, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawal dan menyempurnakan berbagai program prioritas nasional. Ia menilai perbedaan



pandangan dalam demokrasi harus disalurkan melalui mekanisme dialog, bukan penghentian forum diskusi.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya,” kata Qodari pada Rabu (17/6). Ia menambahkan, “Itu namanya semau gue,

maunya dia saja.”

Insiden tersebut terjadi saat diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusrion Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tengah berlangsung. Sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk penolakan

sehingga kegiatan berakhir sebelum seluruh agenda selesai.

Qodari menilai peristiwa itu sebagai anomali karena pada awalnya diskusi berjalan tertib dan diketahui oleh otoritas kampus. “Saya kira dialog itu dijawab dengan dialog yang lain. Itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara demokrasi,” ujarnya.

Terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan program tersebut merupakan bagian dari mandat politik Presiden Prabowo Subianto yang diperoleh melalui pemilihan umum. Menurutnya, masyarakat memberikan dukungan terhadap visi dan program kerja yang disam-

Wakil Ketua DPRD Cirebon Minta Maaf usai Komentar di Medsos Soal Body Shaming Emak-emak pengkritik MBG Tuai Kecamatan



Laporan: Radit

CIREBON, BP-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menyampaikan permohonan maaf kepada publik setelah komentarnya di media sosial yang dinilai mengandung unsur body shaming memicu polemik dan kecaman luas dari masyarakat. Permintaan maaf itu disampaikan menyusul viralnya tangkapan layar komentar pada unggahan terkait aksi demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui akun media sosial pribadinya pada Selasa (16/6), Nana mengakui komentarnya tidak tepat dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. “Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial,” tulis Nana.

Polemik bermula dari video aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Cirebon di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6). Dalam aksi tersebut, seorang ibu menyampaikan penolakan terhadap program MBG. Video itu kemudian beredar luas di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari warganet, termasuk komentar dari akun Instagram @

nanakencanawati yang berbunyi, “Lagian siapa yang mau ngasih lo makan???? Udah GEMBROT!!!!”

Komentar tersebut memicu kritik karena dinilai merendahkan bentuk tubuh seseorang dan tidak pantas disampaikan oleh pejabat publik. Sejumlah tokoh publik, termasuk aktivis dan musisi Melanie Subono, turut menyoreti unggahan tersebut. Di Indonesia, isu body shaming telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan kampanye literasi digital.

Nana menjelaskan bahwa saat komentar itu ditulis, akun Instagram pribadinya sedang digunakan oleh tim media yang membantu pengelolaan akun. “Ketua dan Wakil Ketua DPRD memiliki tim media masing-masing. Kebetulan saat membuka Instagram, tim media itu menggunakan akun ibu dan saat itu komentar tersebut ditulis secara spontan,” ujar Nana. Ia juga mengaku baru mengetahui polemik tersebut setelah menerima banyak telepon pada malam hari karena keterbatasannya dalam menggunakan teknologi.

Menurut Nana, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital. “Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak, berhati-hati, dan menghormati setiap warga

dalam berkomunikasi,” tulisnya. Setelah polemik mencuat, akun Instagram pribadinya diketahui telah diubah ke mode privat.

Fenomena pejabat publik tersandung unggahan media sosial bukan kali pertama terjadi, baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sejumlah pejabat di berbagai negara pernah menghadapi kritik hingga sanksi etik akibat pernyataan di ruang digital yang dinilai diskriminatif atau tidak sensitif. Di Indonesia, etika komunikasi digital pejabat publik semakin mendapat sorotan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan perilaku pejabat melalui media sosial.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Subhan, memilih tidak memberikan tanggapan terkait polemik yang menyeret kader partainya tersebut. Saat dimintai komentar oleh awak media, ia hanya menjawab singkat, “No comment.”

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial bagi pejabat publik. Sebagai representasi masyarakat, pejabat negara dituntut menjaga komunikasi yang santun, menghormati perbedaan pandangan, serta menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan perpecahan di ruang publik digital. (*)

paikan selama masa kampanye.

“Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, tidak bisa diberhentikan,” tegas Qodari. Namun demikian, ia membuka ruang evaluasi terhadap aspek teknis pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.

Secara historis, praktik demokrasi deliberatif yang mengedepankan dialog telah menjadi

prinsip penting di berbagai negara. Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang dalam tradisi musyawarah sejak era reformasi 1998 yang membuka ruang kebebasan berpendapat. Secara internasional, konsep demokrasi deliberatif juga berkembang di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat yang menempatkan dialog publik sebagai instrumen utama penyelesaian konflik kebijakan.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tingkat partisipasi pemilihan pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 81 persen, mencerminkan kuatnya legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai kritik publik tetap penting, namun perlu disampaikan melalui saluran demokratis yang menjaga ruang dialog dan pertukaran gagasan secara konstruktif. (*)

Sultra Jadi Titik Awal SE2026, BPS RI Kerahkan 2.600 Petugas



Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menjadi lokasi pencanangan nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) y

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menjadi lokasi pencanangan nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang menandai dimulainya pendataan ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan sensus yang dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu diharapkan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih akurat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pencanangan SE2026 dilakukan melalui Apel Gabungan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (15/6/2026), yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan apel gabungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sultra Hugua menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BPS RI yang menetapkan Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pencanangan nasional. Menurut dia, hasil sensus akan menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ekonomi daerah.

“Dengan sensus ini tentu akan lahir data yang akurat. Potensi daerah akan semakin terpetakan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar

Hugua.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Deklarasi tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Gubernur dan disaksikan Wakil Kepala BPS RI serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra.

Sebagai penanda dimulainya pendataan lapangan, Wakil Kepala BPS RI bersama Wakil Gubernur Sultra memasang rompi dan tanda pengenalan kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk mendata usaha dan aktivitas ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Menurut dia, kebijakan yang efektif hanya dapat dibangun di atas data yang berkualitas.

“Hari ini merupakan momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Sonny.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Indonesia sebelumnya telah melaksanakan sensus ekonomi pada 1986,

1996, 2006, dan 2016.

Data dari sensus-sensus tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, dan pengembangan usaha.

Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, SE2026 memiliki cakupan yang lebih luas. Untuk pertama kalinya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dimasukkan ke dalam pendataan. Selain itu, aktivitas ekonomi keluarga juga akan didata melalui metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah.

“Setiap usaha yang didata akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Sonny.

BPS mencatat, Sulawesi Tenggara saat ini memiliki sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya semangat kewirausahaan masyarakat. Data hasil sensus nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan peluang ekonomi baru di daerah.

Secara historis, sensus ekonomi telah menjadi praktik umum di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, melaksanakan Economic Census setiap lima tahun sejak abad ke-19, semen-

tara sejumlah negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menggunakan sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal dan industri. Di tingkat global, data ekonomi yang akurat dinilai menjadi instrumen penting untuk mengukur daya tahan ekonomi pascapandemi dan menghadapi transformasi digital.

Sonny juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 melalui gerakan “TIR”, yakni menerima kedatangan petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan memastikan kerahasiaan data tetap terjaga.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya keberhasilan BPS, tetapi keberhasilan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Usai pembacaan deklarasi, pencanangan resmi pelaksanaan SE2026 dilakukan melalui penekanan tombol sirene bersama. Pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media massa, hingga masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif agar sensus menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia. (*)

HKN 2026 Jadi Momentum Penguatan Integritas dan Kesadaran ASN



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memperkuat integritas, disiplin, dan semangat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Rabu (17/6/2026).

Upacara yang diikuti ratusan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu turut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pengawas, pelaksana, hingga pejabat fungsional.

Dalam amanatnya, Hugua menekankan bahwa tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks, mulai dari pengendalian inflasi, peningkatan daya saing daerah, reformasi birokrasi, hingga penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya aparatur yang menjalankan roda pemerintahan.

“Di tengah berbagai tantangan, yang harus kita bangun adalah kebersamaan, kolaborasi, dan saling menjaga. Dengan itu, kita dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif,” kata Hugua.

Ia juga mengingatkan pentingnya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memetakan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Data yang akurat, menurutnya, menjadi dasar

penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Secara historis, Indonesia telah melaksanakan Sensus Ekonomi sebanyak empat kali, yakni pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda nasional untuk memperbarui basis data usaha dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Di tingkat internasional, sensus ekonomi telah lama menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Statistics Division secara berkala mendorong negara-negara anggota melakukan sensus ekonomi guna menghasilkan data statistik yang terstandar dan dapat dibandingkan secara global.

Hugua menegaskan bahwa ASN juga harus memahami kedudukan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Peran tersebut mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.

Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memperkuat, mendorong, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh aparat untuk tidak memandang tugas hanya sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.

Menurut Hugua, kesadaran sejati berbeda dengan sekadar pengetahuan. Kesadaran harus tertanam dalam diri setiap ASN sehingga menjadi fondasi dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

“Kesadaran harus

hidup dalam diri setiap aparatur negara agar setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia pun mengajak ASN untuk menghayati nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Panca Prasetya KORPRI sebagai pedoman moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara historis, Hari Kesadaran Nasional diperingati setiap tanggal 17 sebagai momentum memperkuat nasionalisme dan disiplin aparatur negara. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan semangat pengabdian aparatur kepada bangsa dan negara.

Penguatan birokrasi yang profesional juga menjadi agenda global. Berbagai negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menempatkan integritas aparatur, transparansi, dan pelayanan publik sebagai indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mengakhiri amanatnya, Hugua mengajak seluruh ASN menjadikan diri sebagai teladan bagi masyarakat melalui etos kerja yang tinggi dan pelayanan yang berkualitas.

“ASN harus mampu menunjukkan integritas, disiplin, dan dedikasi sehingga menjadi contoh bagi lingkungan kerja maupun masyarakat luas,” tutur Hugua.

Upacara Hari Kesadaran Nasional tahun ini tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintahan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen ASN Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik di tengah dinamika pembangunan nasional dan global. (*)

Bupati Buton Hadiri Gala Dinner Sambut Kunker Pangdam XIV/Hasanuddin

Pewarta: La Harman

BAUBAU, BP-Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menghadiri gala dinner bersama kepala daerah wilayah Kodim 1413/Buton dalam rangka menyambut kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, di Kota Baubau, Jumat (12/6/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat koordinasi antara unsur TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di wilayah Kepulauan Buton.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Buton, Pangdam XIV/Hasanuddin didampingi Komandan Korem 143/Halu Oleo, Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra hadir bersama sejumlah pejabat daerah lainnya. Turut hadir mewakili Wali Kota Baubau, Sekretaris Kota Baubau La Ode Darus-salam, S.Sos., M.Si., serta mewakili Bupati Buton Selatan, Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto, S.Pd., M.Pd.

Selain itu, acara



juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmin, S.T., beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat terkait lainnya.

Kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan

nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan bahwa kehadiran Pangdam XIV/Hasanuddin di wilayah Kepulauan Buton menjadi kesempatan strategis untuk mempererat hubungan antarlembaga serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah.

Sinergi antara rakyat, pemerintah, dan TNI dinilai memi-

liki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Usai menghadiri gala dinner, Pangdam XIV/Hasanuddin bersama para kepala daerah juga menyempatkan diri mengunjungi Resto Daeng Lala sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kota Baubau.(*)

Bappenas Gelar Rakor Nasional, Geopark Pulau Muna Mulai Dikaji



LABUNGKARI, BP- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI resmi menindaklanjuti usulan pengembangan Pulau Muna sebagai kawasan Geopark melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan pada 17-18 Juni 2026 di Kantor Bupati Buton Tengah, Labungkari. Langkah ini menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah pusat terhadap upaya menjadikan Pulau Muna sebagai destinasi geowisata nasional berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Surat undangan rapat bernomor T-11613/Dt.07.03/PP.06.01/06/2026 tertanggal 11 Juni 2026 ditandatangani Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, Togu Santoso Pardede. Agenda tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengkaji potensi warisan geologi, hayati, dan budaya Pulau Muna sekaligus melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah situs strategis.

Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menyatakan pengembangan Geopark Pulau Muna merupakan hasil kolaborasi tiga daerah, yakni Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat. Menurutnya, penyatuan visi pembangunan pariwisata Pulau Muna telah dirintis sejak kunjungan UKP Pariwisata ke Kadena Glamping Buteng. "Alhamdulillah, segala hal baik akan terwujud bila kita selalu berpikir baik dan berusaha sebaik mungkin," ujar Azhari melalui akun media sosialnya, Kamis (11/6/2026).

Rangkaian kegiatan mencakup pemaparan potensi daerah oleh sekretaris daerah dari tiga kabupaten. Tim Bappenas juga dijadwalkan mengunjungi Gua Liangkabori, Gua Metanduno, Benteng Bombonawulu, Desa Terapung Waburense, Gua Laumehe, serta Tebing Purba Wantopi dan Lasori yang dinilai memi-

liki nilai geologi dan budaya tinggi.

"Geopark bukan hanya soal pelestarian alam, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan," demikian semangat yang menjadi dasar pengembangan kawasan geopark di berbagai negara. Model ini telah terbukti mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal berbasis konservasi.

Secara historis, konsep geopark pertama kali berkembang di Eropa pada awal 2000-an melalui pembentukan European Geoparks Network yang kemudian diadopsi UNESCO. Pada 2015, UNESCO secara resmi meluncurkan program UNESCO Global Geoparks sebagai pengakuan internasional terhadap kawasan yang memiliki warisan geologi bernilai global sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengembangan geopark terus berkembang dalam dua dekade terakhir. Sejumlah kawasan seperti Geopark Ciletuh-Palabuhanratu di Jawa Barat, Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara, dan Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan telah memperoleh status UNESCO Global Geopark dan menjadi contoh keberhasilan integrasi konservasi, pendidikan, serta ekonomi masyarakat.

Bupati Azhari menegaskan bahwa sinergi lintas daerah menjadi kunci keberhasilan pengusulan Geopark Pulau Muna. "Kami menyatukan visi agar Pulau Muna berkembang sebagai satu destinasi wisata unggulan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya. Dukungan Bappenas diharapkan mempercepat proses penetapan Geopark nasional bagi Pulau Muna.

Apabila terealisasi, Geopark Pulau Muna berpotensi memperkuat identitas kawasan Sulawesi Tenggara di tingkat nasional maupun global. Selain menjaga kelestarian situs geologi dan budaya, keberadaan geopark diyakini mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.(*)

Juni 2026 di Kabupaten Konawe. Para peserta diharapkan memanfaatkan pembinaan secara optimal dengan bimbingan pelatih yang kompeten agar mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lain di Sulawesi Tenggara.

Secara historis, MTQ Nasional pertama kali diselenggarakan di Makassar pada 1968 dan sejak itu berkembang menjadi agenda rutin yang tidak hanya memperkuat syiar Islam, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bangsa.

Di tingkat internasional, berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Iran juga rutin menggelar kompetisi tilawah Al-Qur'an yang menjadi wadah pengembangan seni baca Al-Qur'an dan hafalan bagi generasi muda Muslim dunia.

Bagi Kabupaten Buton, pembinaan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kafilah daerah. Kehadiran pemerintah, Kemenag, dan Baznas dalam proses pembinaan menunjukkan sinergi lintas

Buton Intensifkan Pembinaan Kafilah Jelang MTQ Sultra 2026 di Konawe

Pewarta: La Harman

PASARWAJO, BP-Pemerintah Kabupaten Buton mengintensifkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggelar Pembinaan MTQ Tahun 2026 bagi qori, qoriah, hafiz, dan hafizah yang akan menjadi duta daerah. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 12-14 Juni 2026, di salah satu hotel di Pasarwajo, Kabupaten Buton.

Pembinaan yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Buton bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Baznas Buton itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mewakili Bupati Buton pada Jumat (12/6/2026). Hadir pula Plt Kepala



Kemenag Buton Drs. La Diri, M.A., Ketua Baznas Buton, para asisten, kepala OPD, kepala KUA, serta pelatih.

Dalam sambutannya, Sekda Buton menegaskan bahwa pembinaan MTQ bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. "Saya salut kepada penyelenggara, kepada Bagian Kesra dan Kementerian Agama yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini yang bermuara pada peningkatan kualitas

SDM Qur'ani," ujar La Ode Syamsudin.

Ia menambahkan, penguatan literasi menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, Al-Qur'an merupakan sumber literasi utama yang membentuk karakter dan moral masyarakat. "Oleh karena itu, literasi harus kita kuatkan, dan sebaik-baik literasi itu adalah Al-Qur'an," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, Drs. La Diri, M.A., menyebutkan kegiatan tersebut

sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan keagamaan. "Para peserta akan menjadi duta-duta Kabupaten Buton dalam rangka MTQ Provinsi Sultra di Konawe," ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Buton atas dukungannya terhadap pembinaan generasi Qurani.

Kemenag Buton menargetkan daerah tersebut mampu meraih prestasi pada MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 23-28

IDAMAN Resmi Diluncurkan, BPOM Perangi Jamu Ilegal Ber-BKO



Peliput: Andina L

SEMARANG, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi meluncurkan Program Indonesia Sadar Jamu Aman (IDAMAN) sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi masyarakat dan memperkuat pengawasan obat bahan alam (OBA) di Indonesia. Program tersebut diluncurkan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Aula Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/6/2026), dengan target menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota hingga 2029.

Peluncuran program itu dilakukan di tengah masih tingginya temuan produk OBA yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dan beredar secara ilegal. BPOM menilai persoalan tersebut menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat sekaligus menghambat pengembangan industri jamu nasional yang aman dan berdaya saing.

Sepanjang 2025, BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap 11.654 produk OBA dan suplemen kesehatan (SK). Hasilnya, sebanyak 206 produk terbukti mengandung BKO. Sementara patroli siber BPOM menemukan 39.386 tautan penjualan produk OBA ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.

Memasuki periode Januari hingga April 2026, BPOM kembali melakukan pengujian terhadap 1.851 produk OBA. Dari jumlah tersebut, ditemukan 87

item produk mengandung BKO. Temuan itu telah ditindaklanjuti melalui sanksi administratif hingga penegakan hukum sesuai tingkat pelanggaran.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pendekatan pengawasan kini tidak lagi hanya mengedepankan penindakan, melainkan juga pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pelaku usaha.

“Program IDAMAN merupakan transformasi pendekatan pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pelaku usaha,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.

Program IDAMAN merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. Melalui program ini, BPOM bersama pemerintah daerah mengintegrasikan pengawasan, edukasi, dan pendampingan pelaku usaha untuk membangun ekosistem jamu yang aman dan berkelanjutan.

Secara historis, jamu telah menjadi bagian penting dari budaya kesehatan masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Pada 2023, praktik budaya sehat jamu resmi masuk dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO, menandai pengakuan dunia terhadap warisan budaya Indonesia tersebut. Pengakuan internasional itu sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan obat tra-

adisional dunia.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga terus mendorong integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan modern. Pada 2022, WHO meresmikan Global Centre for Traditional Medicine di India sebagai pusat pengembangan dan riset pengobatan tradisional berbasis bukti ilmiah.

Taruna Ikrar menilai, tingginya peredaran produk ilegal menunjukkan perlunya pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa praktik penambahan BKO pada OBA masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Pengawasan BPOM juga diperkuat terhadap importir OBA dan SK. Pada triwulan II 2026, BPOM memeriksa 79 sarana importir di wilayah kerja 10 unit pelaksana teknis (UPT). Hasilnya, ditemukan 109.456 pieces produk tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian mencapai Rp5,95 miliar.

Selain itu, pengawasan daring yang dilakukan 39 UPT BPOM menemukan 224 item atau 194.189 pieces produk yang tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian mencapai Rp36,45 miliar. BPOM akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui penelusuran dan rekomendasi pem-

blokir tautan penjualan kepada instansi terkait.

Di wilayah Semarang, BPOM juga melakukan profiling berbasis teknologi dan inspeksi lapangan. Dari kegiatan itu ditemukan 147 item OBA yang diduga mengandung BKO dan/atau tanpa izin edar sebanyak 13.263 pieces dengan nilai keekonomian mencapai Rp385,5 juta. Seluruh produk telah diamankan untuk mencegah peredaran lebih lanjut.

Sementara itu, hasil pengawasan rutin di Jawa Tengah selama 2025 hingga Maret 2026 menunjukkan BPOM telah memeriksa 119 sarana produksi dan distribusi OBA. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 10.267 pieces produk mengandung BKO dengan nilai keekonomian mencapai Rp503,3 juta.

Dalam aspek penegakan hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM pada 2026 telah menindaklanjuti 15 sarana ilegal di tujuh UPT yang memproduksi OBA mengandung BKO dan tanpa izin edar. Total nilai temuan dari kasus tersebut mencapai Rp1,67 miliar.

“Ke depan, partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mereplikasi program ini diharapkan mampu menurunkan peredaran OBA yang tidak memenuhi ketentuan,” kata Taruna Ikrar.

Program IDAMAN akan diwujudkan melalui pembentukan Kader Jamu Aman, edukasi bahaya BKO,

Klinik Estetika Tanpa Izin di Bali Ditutup, WNA Ikut Diperiksa

JAKARTA, BP-Pemerintah menutup sebuah klinik kecantikan ilegal di Bali setelah ditemukan pelanggaran serius berupa penyelenggaraan layanan medis tanpa izin serta penggunaan tenaga medis warga negara asing (WNA) yang tidak memiliki dokumen praktik resmi di Indonesia. Penindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga reputasi Bali sebagai destinasi wisata kesehatan kelas dunia.

Langkah penutupan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Klinik yang ditindak adalah PRIME Skin Clinic, yang sebelumnya dikenal dengan nama Elasto Beauty.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik layanan kesehatan yang melanggar ketentuan hukum nasional.

“Saat ini fasilitas tersebut sudah ditindaklanjuti dan ditutup. Semua instansi lintas sektoral siap menindak sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Aji melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (16/6).

Penindakan terhadap klinik tersebut merupakan hasil investigasi bersama yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.

Dari hasil pemeriksaan, fasilitas kesehatan tersebut diketahui tidak terdaftar dalam sistem Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Kemenkes. Temuan ini mengindikasikan bahwa klinik beroperasi tanpa izin operasional resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi kesehatan Indonesia.

Selain persoalan perizinan, aparat juga menemukan tenaga medis dan tenaga kesehatan asal Rusia dan Armenia yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP). Kedua dokumen tersebut merupakan syarat wajib bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan medis di Indonesia.

“Layanan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan perizinan resmi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Aji.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini terus mengumpulkan fakta dan bukti pendukung guna

memperkuat proses hukum lanjutan, baik dari aspek kesehatan, keimigrasian, maupun perizinan usaha.

Aji mengingatkan bahwa penggunaan obat dan alat kesehatan tanpa izin edar, termasuk praktik tenaga medis ilegal, merupakan pelanggaran serius yang dapat membahayakan keselamatan pasien.

“Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku demi menjaga integritas sistem kesehatan nasional,” katanya.

Secara historis, Indonesia telah beberapa kali melakukan penertiban terhadap fasilitas kesehatan ilegal. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga menindak sejumlah praktik layanan kesehatan tanpa izin dan peredaran alat kesehatan ilegal sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan kesehatan nasional.

Di tingkat internasional, pengawasan terhadap klinik estetika ilegal juga menjadi perhatian berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berulang kali menekankan pentingnya regulasi ketat terhadap layanan estetika medis karena meningkatnya tren wisata kesehatan dan risiko keselamatan pasien lintas negara.

Bali sendiri dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu tujuan wellness tourism di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan industri kesehatan dan kecantikan yang pesat turut meningkatkan kebutuhan pengawasan agar kualitas layanan tetap terjaga dan sesuai standar internasional.

“Kemenkes berkomitmen melindungi masyarakat melalui pengawasan mutu pelayanan kesehatan,” ujar Aji menegaskan komitmen pemerintah terhadap keselamatan publik.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam memilih layanan kesehatan dengan memastikan legalitas fasilitas dan kompetensi tenaga medis. Warga juga dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi pemerintah untuk melaporkan dugaan praktik kesehatan ilegal.

Penutupan klinik ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan, tetapi juga memperkuat kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara terhadap Bali sebagai destinasi wisata kesehatan yang aman, berkualitas, dan terpercaya. (*)

pelatihan higiene dan sanitasi, pendampingan UMKM OBA, serta fasilitasi perizinan usaha. Pemerintah daerah diharapkan menjadi ujung tombak pembinaan dan edukasi masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Ya-

sin Maimoen bersama unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media massa turut mendukung penguatan budaya konsumsi jamu yang aman. Masyarakat juga diimbau menerapkan prinsip Cek KLIK”Cek Kema-

san, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa”serta membeli produk hanya dari sarana resmi dan terpercaya.

“Melalui Program IDAMAN, kita membangun ekosistem jamu yang aman, bermutu, dan berdaya saing,” ujar Kepala BPOM. (*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara				

PPATK Usulkan Tambahan Anggaran Rp516 Miliar untuk Perkuat Pemberantasan TPPU



Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar pada tahun anggaran 2027 guna memperkuat program pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6), mengusul pagu indikatif yang diterima lembaga itu hanya sebesar Rp252,7 miliar.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran ideal lembaganya pada 2027 mencapai Rp769,8 miliar. Menurut dia, pagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan strategis PPATK. “Pada kesempatan ini kami menyampaikan usulan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp516,4 miliar yang kiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan

pagu anggaran Juli 2026,” kata Ivan dalam rapat tersebut.

Dari total usulan tambahan anggaran itu, sebesar Rp410,3 miliar direncanakan untuk program pemberantasan TPPU, sementara Rp106,1 miliar dialokasikan bagi dukungan manajemen internal. Tambahan dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem analisis transaksi keuangan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi kejahatan keuangan yang semakin kompleks.

Ivan mengungkapkan bahwa sebagian besar pagu indikatif yang diterima saat ini justru habis untuk kebutuhan rutin. Dari total Rp252,7 miliar, sekitar Rp206 miliar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, Rp19,3 miliar untuk pemeliharaan teknologi informasi, serta Rp26,7 miliar bagi operasional dan pemeliharaan perkantoran. “Anggaran yang tersedia saat ini pada dasarnya lebih banyak digunakan untuk operasional kantor dan kegiatan pelatihan,” ujarnya.

Secara historis, PPATK sejak berdi-

ri pada 2002 melalui amanat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terus mengalami peningkatan peran dalam sistem keuangan nasional. Indonesia sendiri pernah masuk daftar negara yang dianggap belum kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang oleh Financial Action Task Force (FATF) pada awal 2000-an sebelum akhirnya memperbaiki sistem pengawasannya dan resmi menjadi anggota penuh FATF pada 2023.

Di tingkat global, upaya pemberantasan pencucian uang semakin diperkuat setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat yang mendorong negara-negara memperkuat pengawasan arus dana ilegal dan pendanaan terorisme. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memperkirakan nilai pencucian uang dunia mencapai 2-5 persen dari produk domestik bruto global setiap tahun, atau setara triliunan dolar AS.

Menurut Ivan, kebutuhan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar PPATK mampu menjalankan fungsi analisis dan

pengawasan transaksi keuangan secara optimal. “PPATK telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp769,8 miliar,” katanya. Ia menambahkan, penguatan kapasitas lembaga diperlukan seiring meningkatnya kompleksitas modus pencucian uang lintas negara.

Usulan tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas pada tahap penetapan pagu anggaran pemerintah pada Juli 2026. Dukungan anggaran dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi.

Keberhasilan pemberantasan TPPU selama ini tidak hanya berdampak pada pemulihan aset negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Karena itu, penguatan kapasitas PPATK dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. (*)

Pengacara Sony Bantah Elza Ada Fakta Disembunyikan dalam Kasus MBG

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, Krisna Murti menegaskan kliennya telah menyampaikan seluruh informasi kepada penyidik terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pengakuan pengacara Elza Syarif yang merasa dibohongi dan menduga masih ada fakta yang ditutupi dalam kasus tersebut.

Krisna menyatakan selama proses pendampingan hukum, Sony bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara terbuka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurut dia, seluruh informasi yang diketahui kliennya telah disampaikan kepada penyidik tanpa ada pihak yang sengaja dilindungi.

“Setahu saya, Pak Sony sudah buka semua dalam BAP. Saya enggak mengerti arahnya ke mana Bu Elza,” kata Krisna kepada wartawan, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, saat pemeriksaan berlangsung dirinya dan Elza Syarif sama-sama mendampingi Sony sehingga mengetahui materi keterangan yang diberikan kepada penyidik. “Nama-namanya sudah disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Pak Sony,” ujar Krisna.

Di sisi lain, Krisna mengungkapkan bahwa berakhirnya keterlibatan Elza dalam tim hukum bukan karena pengunduran diri, melainkan pencabutan kuasa oleh pihak keluarga. “Bukan mundur tapi dicabut. Saya baru tahu dari keluarga melalui staf saya,” ucapnya.

Sebelumnya, Elza Syarif menyatakan tidak lagi menjadi kuasa hukum Sony sejak Senin (15/6). Keputusan itu diambil setelah Kejaksaan Agung menetapkan Asep Yusuf Somantri (AYS), yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program MBG.

Elza mengaku kecewa karena memperoleh informasi bahwa Asep diduga rutin memberikan sejumlah uang hasil jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan

Gizi (SPPG) kepada Sony. “Saya merasa ada yang dibuka dan ada yang dilindungi,” kata Elza kepada wartawan, Selasa (16/6).

Secara historis, kasus dugaan korupsi dalam program sosial dan pangan kerap menjadi perhatian publik di Indonesia. Sebelumnya, penegak hukum pernah menangani kasus korupsi bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 yang menyeret pejabat negara. Di tingkat internasional, berbagai negara juga menghadapi persoalan serupa dalam pengelolaan program bantuan pangan dan gizi, sehingga penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi standar global dalam pengelolaan dana publik.

Kasus dugaan korupsi MBG ini kembali menguji integritas tata kelola program kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung diharapkan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pemenuhan gizi nasional. (*)



Sony mengajukan permohonan justice collaborator kepada Jampidsus pada 8 Juni 2026. Pihaknya menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. “Kami bukan mau menghindari dari permasalahan hukum, tetapi ingin mengungkap siapa saja yang terlibat,” ujar Krisna di Gedung Bundar Kejagung.

Krisna menyebut terdapat sedikitnya 26 nama tokoh yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, ia menegaskan jumlah itu baru sebagian dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program MBG. “Kami bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap peranan-peranan yang leb-

ih besar,” katanya.

Secara historis, penggunaan justice collaborator dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah beberapa kali menjadi instrumen penting penegakan hukum. Dalam sejumlah perkara besar, seperti kasus suap Wisma Atlet SEA Games dan korupsi proyek e-KTP, keterangan pelaku yang bekerja sama membantu penyidik mengungkap jaringan pelaku yang lebih luas. Secara internasional, konsep serupa juga diterapkan dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Italia untuk membongkar kejahatan terorganisasi dan korupsi berskala besar.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkat-

kan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, tata kelola program ini menjadi sorotan publik dan dinilai harus memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan strategis pemerintah.

Perkembangan penyidikan kasus ini diperkirakan akan menentukan arah pengungkapan dugaan korupsi Program MBG secara lebih luas. Kejagung menegaskan akan mendalami seluruh informasi yang disampaikan tersangka, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam perkara tersebut. (*)

Kejagung Dalam Justice Collaborator Sony Sonjaya dalam Kasus Korupsi MBG

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, guna mengonfirmasi permohonan justice collaborator (JC) yang diajukannya dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali informasi baru terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang telah

menjerat lima tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari substansi permohonan JC tersebut. “Untuk dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengonfirmasi pengajuan JC yang disampaikan kepada kami,” ujar Syarif di kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6).

Menurut Syarif, mekanisme justice col-

laborator diberikan kepada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar peran pihak lain yang lebih besar. Karena itu, penyidik tidak hanya memeriksa nama-nama yang disebutkan, tetapi juga informasi dan alat bukti yang dapat mendukung pengungkapan perkara. “JC itu diberikan kepada pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar,” katanya.

Sony Sonjaya ditetapkan sebagai ter-

sangka pada 3 Juni 2026 bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan pejabat BGN Lodewyk Pusung. Penetapan itu dilakukan sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot ketiganya dari jabatan strategis di BGN. Belakangan, penyidik juga menetapkan Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta serta Komisariss PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono, sehingga jumlah tersangka menjadi lima orang.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti,

Bunda Literasi Baubau Aryati Yusran Ajak Anak Kembali Cintai Buku dan Budaya Membaca Lewat Lomba Bertutur Tingkat SD/MI



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau kembali mempertegas komitmennya dalam membangun budaya literasi di kalangan generasi muda dengan menggelar Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Sederajat se-Kota Baubau Tahun 2026. Kegiatan yang resmi dibuka oleh Bunda Literasi Kota Baubau, Hj Sitti Aryati Yusran, pada Kamis (11/6/2026) itu diharapkan menjadi sarana menumbuhkan minat baca sekaligus membentuk karakter anak sejak usia dini.

Pembukaan lomba berlangsung dengan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Baubau, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau beserta jajaran, dewan juri, kepala sekolah, guru pendamping, serta orang tua peserta yang memberikan dukungan kepada putra-putri mereka.

Dalam sambutannya, Hj Sitti Aryati Yusran menilai tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini adalah semakin kuatnya ketergantungan anak terhadap perangkat digital. Karena itu, pemerintah daerah berupaya

menghadirkan ruang-ruang kreatif yang mampu mengembalikan kedekatan anak dengan buku dan aktivitas membaca.

“Lomba bertutur bukan hanya tentang kemampuan berbicara atau tampil di atas panggung. Lebih dari itu, kegiatan ini mengajarkan anak-anak untuk memahami isi bacaan, menyampaikan pesan moral, melatih keberanian, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan membangun rasa percaya diri,” ujarnya.

Menurut Aryati, kegiatan tersebut juga menjadi media efektif untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya bangsa kepada generasi muda. Cerita rakyat dan buku-buku bertema budaya Nusantara yang dibacakan peserta mengandung nilai keteladanan, sopan santun, hingga semangat gotong royong yang penting diwariskan kepada anak-anak.

“Melalui cerita rakyat dan buku budaya Nusantara, anak-anak diajak mengenal nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari jati diri bangsa,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kebanggaannya atas capaian Kota

Baubau yang telah tiga kali dipercaya mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara pada Lomba Bertutur Tingkat Nasional. Rekam jejak tersebut menjadi bukti bahwa potensi dan kualitas pelajar Baubau mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

“Alhamdulillah, Kota Baubau telah tiga kali menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Lomba Bertutur Tingkat Nasional. Prestasi ini adalah bukti nyata kemampuan dan kreativitas anak-anak kita,” ungkap Aryati.

Bunda Literasi berharap prestasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi peserta tahun ini untuk terus mengembangkan kemampuan bahasa tanpa takut bermimpi besar. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukan satu-satunya tujuan, melainkan proses belajar dan keberanian untuk tampil juga merupakan pencapaian yang bernilai.

“Selamat mengikuti lomba kepada seluruh peserta. Tampilkan kemampuan terbaik dengan penuh semangat, percaya diri, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” pesannya.

Di sisi lain, Aryati menekankan bahwa penguatan budaya

literasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Sinergi antara sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat menjadi fondasi penting agar kebiasaan membaca dapat tumbuh secara berkelanjutan di lingkungan anak.

Secara historis, pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan dan kegiatan bertutur telah lama menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah pusat secara berkala mendorong gerakan literasi sekolah dan berbagai kompetisi membaca maupun bertutur sebagai upaya memperkuat kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan berkomunikasi sejak usia dini.

Dalam konteks global, lembaga internasional seperti UNESCO selama bertahun-tahun menempatkan literasi sebagai salah satu fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Berbagai negara juga mengembangkan program mendorong, membaca bersama, dan kompetisi literasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa sekaligus melestarikan budaya lokal di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Melalui penyelenggaraan Lomba Bertutur Tahun 2026, Pemerintah Kota Baubau berharap lahir generasi muda yang tidak hanya mahir berbicara di depan publik, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap membaca, menghargai warisan budaya, serta siap berkompetisi di tingkat nasional dengan bekal karakter yang kuat dan wawasan yang luas.(*)

Digitalisasi Birokrasi Jadi Fokus Utama Arahkan Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah



Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital birokrasi, meningkatkan penyerapan anggaran, serta membuka peluang kerja luar negeri bagi generasi muda melalui berbagai kerja sama dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Baubau, Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., saat memimpin apel pagi ASN lingkup Pemkot Baubau, Senin (15/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Wawali memaparkan hasil kunjungan kerja bersama Wali Kota Baubau ke sejumlah kementerian di Jakarta, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil pertemuan tersebut diharapkan memperkuat pelayanan publik sekaligus membuka akses kerja ke luar negeri bagi warga Baubau yang belum memiliki pekerjaan.

“Kita harus mengawal seluruh bantuan dan program yang dijanjikan pemerintah pusat dengan data yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.

Menurut Wawali, peluang kerja luar negeri menjadi salah satu alternatif strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, pemerintah melalui skema penempatan pekerja mi-

gran terus memperluas pasar kerja ke berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara di Eropa. Data pemerintah pusat menunjukkan re-mitansi pekerja migran Indonesia setiap tahun menyumbang miliaran dolar Amerika Serikat bagi perekonomian nasional.

Selain membahas peluang kerja global, Wawali juga mengingatkan seluruh OPD untuk mempercepat realisasi program dan penyerapan anggaran menjelang berakhirnya semester pertama Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan maupun anggaran pada akhir tahun.

“Jangan sampai ada utang tugas di penghujung tahun. Semua program harus dikawal dan diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.

M e n g h a d a p i proyeksi fiskal 2027 yang diperkirakan semakin ketat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan rekonsiliasi program, menetapkan prioritas pembangunan, serta memanfaatkan ruang fiskal secara lebih efektif. Arahkan tersebut sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja negara yang beberapa tahun terakhir terus diterapkan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

Pada sektor reformasi birokrasi, implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2026 menjadi

perhatian utama. Wawali meminta seluruh pimpinan OPD segera mengevaluasi kendala yang menyebabkan penerapan TTE belum mencapai 100 persen. Dinas Perpustakaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diminta aktif mendampingi OPD lain dalam menyelesaikan persoalan teknis.

“Digitalisasi administrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar Baubau dan Sulawesi Tenggara mampu menjadi daerah terdepan dalam pelayanan publik modern,” kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Transformasi digital pemerintahan sendiri telah menjadi tren global sejak satu dekade terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui E-Government Development Index (EGDI) terus mendorong negara-negara mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indonesia pun dalam beberapa tahun terakhir terus mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

“Setiap ASN memiliki peran penting dalam organisasi. Seperti sekrup dalam sebuah pesawat besar, semuanya dibutuhkan agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Wawali mengingatkan pentingnya disiplin dan kolaborasi seluruh aparatur.(*)

Camat Bungi Hasrun Lepas Petugas SE2026, Tekankan Sinergi dengan Kelurahan

BAUBAU, BP- Camat Bungi, Hasrun, S.IP., secara resmi melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Senin (15/6/2026). Pelepasan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bungi tersebut menandai dimulainya pengumpulan data aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pamban-

gunan daerah.

Hasrun menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis petugas, tetapi juga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah kelurahan serta masyarakat. Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

“Koordinasi yang baik antara petugas, pemerintah kelurahan,

dan masyarakat menjadi kunci kelancaran pendataan sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hasrun saat memberikan arahan kepada petugas.

Ia juga mengingatkan para petugas agar mengedepankan sikap santun selama menjalankan tugas di lapangan. Pendekatan yang humanis dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga proses pendataan berjalan lancar

dan menghasilkan informasi yang valid.

“Jika ada kendala di lapangan, secepatnya berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, lurah setempat, atau pihak kecamatan agar persoalan yang dihadapi dapat segera ditangani,” tegas Hasrun.

Secara historis, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali. Indonesia telah melaksanakan sensus serupa pada

usaha dan perkembangan sektor ekonomi. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Statistics Division juga mendorong negara-negara anggota melaksanakan sensus ekonomi sebagai instrumen penting perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Hasrun berharap seluruh petugas SE2026 Kecamatan Bungi menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. “Kepercayaan masyarakat harus dijaga agar data

yang diperoleh benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah,” katanya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kecamatan Bungi diharapkan mampu menghasilkan potret terkini kondisi ekonomi masyarakat Kota Baubau. Data tersebut nantinya menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)